

MASALAH DAN PROSPEK DEMOKRASI

Oleh : Abd. Kadir Patta

ABSTRAK

Demokratisasi dapat diartikan sebagai suatu transformasi atau proses untuk mencapai suatu system yang demokratis. Sedangkan makna dan subtansi kata demokrasi itu sendiri berarti secara sederhana-pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam arti yang (relative) agak luas, demokrasi sering dimaknai sebagai pemerintahan dengan segenap kegiatan yang dikelola, dijalankan dengan menjadikan rakyat sebagai subjek dan titik tumpu roda penentu berjalannya kepolitikan dan pemerintahan. Oleh karena demokrasi merupakan system yang bertumpu pada daulat rakyat, maka nihilisme terhadap daulat elite, atau daulat partai, atau daulat Negara, ataupun daulat militer musti disingkirkan.

Kata kunci : Prospek dan demokrasi

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan tema sentral perubahan ekonomi-politik dunia dewasa ini , yang didalamnya tercakup berbagai persoalan yang saling berkait satu sama lain. Demokrasi telah menjadi objek studi yang sangat luas rentang pembahasannya. Ada yang menekankan pada pendekatan atau masalah nilai dan budaya (Almond dan Verba, 1984; Harrison dan Huntington, 2000), model dan bentuk baru demokrasi (Held, 1986 dan 1999; Dahl, 1999), masalah-masalah civil-society (Diamond, 1992), masalah civilian supremacy upon military (Huntington, 1956; Diamond dan Plattner (ed.), 2000), tingkatan modernisasi demokrasi (Apter, 1987; Diamond, Linz, and

Lipset (eds.), 1990; International IDEA, 2001), pilihan strategi-strategi demokrasi; O'Donnell dan Schmitter, 1993; Huntington, 1991), lembaga-lembaga demokrasi (Linz and Valenzuela (ed.), 1994).

Demokrasi pada hakekatnya merupakan pemerintahan rakyat (dari kata *deemos*=rakyat dan *cratia*=pemerintah). Secara substantif acuannya adalah prinsip kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang berdaulat, bukan penguasa.

Demokrasi lahir di era Yunani kuno sekitar abad kelima sebelum masehi, saat itu polis (Negara-kota) Atena yang mempraktekannya dengan penduduk hanya sekitar 20-40 ribuan jiwa. Karena jumlah penduduknya yang relative kecil memungkinkan diterapkannya demokrasi langsung (*direct democracy*)

Wujudnya adalah sidang rakyat (*ecclesia*) berkala dimana warga polis dapat terlihat langsung dan terbuka sebagai partisipan. Ketika itu Atena ingin mewujudkan demokrasi sesuai makna idealnya, rakyatlah yang memerintah dirinya sendiri, membuat peraturan sendiri, dan mengelola keperluan hidup bersama secara sendiri, termasuk memilih pemimpin tanpa diwakili sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai wakil rakyat.

Jadi sistemnya tidak mengintrodusir lembaga perwakilan yang kita kenal saat ini. Sayangnya demokrasi polis ala Yunani tersebut bukanlah model demokrasi sejati karena hanya dapat dinikmati sekelompok kecil orang yang berstatus warga Negara.

Golongan sosial tertentu seperti budak, wanita dan pendatang dianggap tak punya hak milik sehingga tidak berhak berstatus warga Negara sehingga tidak punya hak pilih dan hak berpartisipasi dalam menentukan kehidupan pemerintahan. Dalam perkembangannya, demokrasi polis itu akhirnya ketika Negara-kota (*city state*) berubah menjadi Negara-bangsa (*nation state*)

Dengan luas wilayah dan penduduk yang umumnya jauh lebih besar dan plural membuat direct democracy sulit dipraktikkan sehingga lahirah demokrasi tidak langsung atau perwakilan (indirect democracy atau representative democracy), rakyat menyerahkan kekuasaan politiknya pada lembaga perwakilan

Dalam pengisian keanggotaan lembaga perwakilan bukannya dipilih dari dan oleh rakyat tetapi dari kalangan bangsawan yang ditunjuk / diangkat oleh raja. Akibat pemberontakan rakyat yang merasa tidak terwakili, terjadi perubahan formasi pemilihan lembaga perwakilan, dikembalikan pada pemilik kedaulatan asli, rakyat (demos)

Dengan demikian secara sederhana, defenisi demokratisasi dapat diartikan sebagai suatu transformasi atau proses untuk mencapai suatu system yang demokratis. Sedangkan makna dan subtansi kata demokrasi itu sendiri berarti-secara sederhana-pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam arti yang (relative) agak luas, demokrasi sering dimaknai sebagai pemerintahan dengan segenap kegiatan yang dikelola, dijalankan dengan menjadikan rakyat sebagai subjek dan titik tumpu roda penentu berjalannya kepolitikan dan pemerintahan. Oleh karena demokrasi merupakan system yang bertumpu pada daulat rakyat, maka nihilisme terhadap daulat elite, atau daulat partai, atau daulat Negara, ataupun daulat militer musti disingkirkan.

Dalam literatur politik (modern) disebutkan beberapa ciri pokok dari sebuah sistem politik yang demokratis, adalah :

Pertama, adanya partisipasi politik yang luas dan otonom; demokrasi pertama-tama mensyaratkan dan membutuhkan adanya keleluasaan bagi siapa pun-baik individu maupun kelompok-secara otonom. Tanpa perluasan partisipasi politik yang otonom, demokrasi akan berhenti sebagai jargon politik semata. Oleh karenanya, elemen pertama dalam sebuah system politik yang demokratis ialah adanya partisipasi politik yang luas dan otonom.

Kedua, terwujudnya kompetisi politik yang sehat dan adil. Dalam konteks demokrasi liberal, seluruh kekuatan politik (partai politik) atau kekuatan-sosial-kemasyarakatan (kelompok kepentingan dan kelompok penekan) diakui hak hidupnya dan diberi kebebasan untuk berkompetisisecara adil sebagai corong masyarakat, baik dalam pemilihan umum atau dalam kompetisi sosial-politik lainnya.

Ketiga, adanya suksesi atau sirkulasi kekuasaan yang berkala, terkelola, serta terjaga denagn bersih dan transparan-khususnya melalui proses pemilihan umum.

Keempat, adanya monitoring, control, serta pengawasan terhadap kekuasaan (eksekutif, legilatif, yudikatif, birokrasi, dan militer) secara efektif, juga terwujudnya mekanisme checks and balances di antara lembaga-lembaga Negara.

Serta kelima, adanya tatakrama, nilai, norma yang disepakati (bersama) dalam bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.

MASALAH DEMOKRASI

Dengan perubahan tersebut maka sejak kehadiran Negara modern (modern-state) itupun bentuk demokrasi mensyaratkan adanya pemilu. Dalam pelaksanaannya, makna sejati ide demokrasi an sich tetap ingin dipertahankan. Rakyat tetap diakui sebagai sumber kedaulatan. Namun demikian, partisipasi dan suaranya dalam proses pemerintahan diwakilkan pada segelintir orang(kaum elite) pada lembaga perwakilan

Melalui prosedur pemilu tersebut rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen atau legislative) dan pemerintahan. Melalui prosedur pemilu dibuat penentuan bahwa pihak yang berhak tampil memerintah harus melalui prosedur kompetisi dimana pemenangnya adalah kontestan yang berhasil memperoleh suara mayoritas dalam pemilu. Masalahnya, dengan system pemilihan yang berdasarkan pada suara mayoritas terdapat kelemahan yang krusial. Kekuasaan yang dilahirkan sering tidak

adil, karena merugikan suara minoritas yang biasanya dipaksa ikut pada keputusan bersama meskipun tidak disetujuinya. Apalagi jika cara yang berlaku adalah pola hitungan suara mayoritas sederhana (50+1) yang berarti jumlah yang menolak relative masih amat besar. Masalah lainnya, pemerintah perwakilan yang dipilih oleh rakyat sering kali mengambil keputusan dengan mengatasnamakan suara rakyat sehingga kekuasaannya potensial menjelma menjadi "tirani mayoritas".

Meskipun disisi lain tak hanya "tirani mayoritas" namun sebenarnya "tirani minoritas" dapat juga menjelma, mengingat posisi salah satunya atas yang lain masing-masing tidak menjamin adanya kepuasan yang adil. Masalah krusial lainnya adalah karena demokrasi Negara-modern itu terlalu menekankan pendekatan procedural (institusional) dengan indikator hadirnya parlemen, partai politik, dan pemilu

Padahal jika syarat procedural tersebut yang jadi ukuran, akan banyak Negara mengklaim diri demokratis, meski dalam prakteknya bertentangan atau jauh dari idealitas demokrasi itu sendiri. Akhirnya penilaian bahwa dalam perkembangannya sejak era Yunani kuno hingga kini, demokrasi belum pernah terwujud sesuai makna ideal apalagi hakikinya. Yang terjadi baru sampai pada sekedar usaha untuk mendekati makna idealnya. Artinya, belum pernah ada satupun Negara di dunia ini yang telah dan pernah mencapai tahap perkembangan riil demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Bahkan prakteknya di Negara-negara maju seperti di Eropa dan AS yang dianggap sebagai kampiun demokrasi, menurut Robert Dahl (1992), baru mencapai tahap yang diistilahkan sebagai poliarki (poliarchy).

Suatu perkembangan tahapan politik modern yang baru berhasil dicapai adalah proses liberalisasi lembaga-lembaga politik namun belum mencaoi perwujudan cita-cita demokrasi yang berdasarkan prinsip persamaan bagi setiap Negara tanpa kecuali berperan sebagai subyek politik.

PROSPEK DEMOKRASI INDONESIA

Menghadapi masalah politik di Indonesia dewasa ini yang diwarnai hiruk pikuk demokrasi semenjak keruntuhan rezim otoritarian Orde Baru perlu dibedakan antara ilusi demokrasi dan mekanisme proseduralnya.

Meletakkan demokrasi pada ilusi atau nilai-nilai sesuai makna idealnya berarti mengabaikan konteks perwujudan prinsip kedaulatan rakyat, sementara demokrasi bagaimana pun menuntut harus dipraktikkan.

Demokrasi dalam perwujudannya memang tak semudah menggosok Lampu Aladin. Mengutip Frans Magnis Suseno (1995), demokrasi sesungguhnya mengandung sifat relativistic dan kontekstualitas. Karena itu, maka perlu disadari bahwa demokrasi dalam perwujudannya merupakan proses "menjadi" meski bertahap dan evolusioner

Demokrasi tidak hanya mensyaratkan perubahan pada lembaga-lembaga politik tetapi juga perilaku pelakunya. Jika nilai-nilai masyarakat belum siap maka actual menimbulkan masalah anomi. Namun demikian demokrasi harus tetap berusaha diwujudkan meski kontestasinya baru sebatas sebagai sebuah proses belajar.

Ada dua hal yang bisa jadi indicator untuk menilai ada tidaknya upaya perwujudan demokrasi. *Pertama*, adanya sikap belajar yang tumbuh dikalangan pelaku untuk menyadari dan menggunakan hak-hak politiknya seraya menghargai setiap perbedaan dan pluralitas tanpa memaksakan kepentingan dengan menggunakan kekerasan. *Kedua*, terkait konteks konsolidasinya yang ditandai dengan diterapkannya system politik yang secara procedural bersifat terbuka dan selalu memunculkan dorongan bagi peningkatan control rakyat terhadap pemerintah untuk mencegah penguasa politik bertindak tidak demokratis.

Dalam konteks ini perwujudan demokrasi tidak sepenuhnya tergantung dari rakyat. Secara cultural, perkembangannya amat ditentukan oleh kaum elite. Apakah berhasil menyosialisasikan nilai nilai demokrasi melalui perilakunya, atau tidak sehingga rakyatpun bisa belajar mengembangkan kesadaran dan partisipasi yang bersifat etis pula.

Dibutuhkan kemauan dan keteladanan elit untuk menerjemahkannya kedalam perilaku mereka sehingga terbangun pula masyarakat yang sadar demokrasi, Untuk peningkatan kualitas praktek demokrasi di Indonesia penting melihat perkembangan tata nilai pribadi (individu) dan kolektif (masyarakat) kita.

Sekitar tujuh tahun perjalanan revormasi, sejak keruntuhan orde baru, apakah masyarakat semakin mampu menunjukkan perilaku politik yang kian dewasa atau malah kian devisit jauh dari tuntutan idealitas demokrasi. Jika jawabannya negative, maka berarti sebenarnya kalangan elite sendiri belum belajar demokrasi selama ini.

KESIMPULAN

Paham demokrasi sama sekali tidak bisa menjamin bahwa warga masyarakat suatu nagara yang menjalankannya akan bahagia, makmur, dan adil. Pemerintahan manapun, termasuk pemerintahan yang paling demokratis, tak akan mampu memenuhi tujuan-tujuan ideal tersebut di muka. Bahkan dalam praktiknya demokrasi selalu mengecewakan dari apa yang dicita-citakan olehnya. Seperti usaha-usaha sebelumnya untuk mencapai pemerintahan yang demokratis, Negara-negara demokrasi modern juga menderita banyak kerusakan (Snyder 2003)

Terlepas dari cacat demokrasi, bagaimanapun juga kita harus terus memandang berbagai keuntungan yang membuat terus demokrasi diharapkan. Ada beberapa alasan mengapa demokrasi begitu marak ingin diwujudkan hingga saat ini. Setidaknya, menurut Robert Dahl

(1999), ada ada sepuluh keuntungan demokrasi dibandingkan system politik lainnya, yaitu:

1. Demokrasi menolong mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrat yang kejam dan licik;
2. Demokrasi menjamin bagi warga Negeranya dengan sejumlah hak asasi yang tidak diberikan dan tidak dapat diberikan oleh system-sistem yang nondemokratis;
3. Demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya daripada alternative system politik lain yang memungkinkan;
4. Demokrasi membantu rakyat untuk melindungi kepentingan dasar mereka;
5. Demokrasi membantu perkembangan manusia lebih baik daripada alternative system politik lain yang memungkinkan;
6. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasan dalam menentukan nasibnya sendiri;
7. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggungjawab moral;
8. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat membantu perkembangan tingkat persamaan politik yang relative tinggi;
9. Negara-negara demokrasi perwakilan modern tidak berperang satu dengan lainnya; serta
10. Negara-negara dengan pemerintahan yang demokratis cenderung lebih makmur daripada Negara-negara dengan pemerintahan yang nondemokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Duverger, Maurice. 1993. *Sosiologi Politik*. PT Raja Grafindo Persada:Jakarta
- Nurtjahyo Henra, 2006. *Filsafat Demokrasi*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Gould, C. Carol, 1993, *Demokrasi Ditinjau Kembali*. PT. Tiara Wacana, Yogya.
- Raga Maran, Rafael. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Rineka Cipta:Jakarta.
- Sorensen Georg. 1993 *Demokrasi Dan Demokratisasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Slamet,E. Ina, 2005. *Yang Berkuasa , Yang Tersisih, Yang Tak Berdaya*, Yayasan AKATIGA, Bandung.
- Tribun Timur, 2006, *menggugat demokrasi*, PT. Bosowa Media Grafika, Makassar.